

BAB IV

ANALISIS KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PEMBUATAN KEPUTUSAN DESA DALAM PERSPEKTIF GENDER

Dalam bab ini menguraikan hubungan dan pengaruh laki-laki terhadap perempuan dalam pemerintahan desa yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan, serta kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa di Desa Pesagi dan Pagendisan yang dilakukan oleh perangkat desa, BPD, PKK serta dalam kepemimpinan kepala desa perempuan di Desa Pesagi dan Pagendisan dalam Musrenbangdes.

Sesuai dengan UU Desa No. 6 tahun 2014 Pemerintah desa terdiri dari kepala desa yang didampingi oleh perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan dan melayani masyarakat. Sementara itu, BPD adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan anggotanya sebagai perwakilan penduduk desa berdasarkan wilayah dan dipilih secara demokratis. Fungsi pemerintah sebagai penyelenggara desa tidak dapat lepas dari perempuan didalamnya, dimana dalam pemerintah Desa Pesagi dan Pagendisa terdapat perempuan yang masuk dalam pemerintahan dalam perangkat desa, BPD, lembaga desa, bahkan kedua desa tersebut memiliki kepala desa perempuan, dimana dengan adanya anggota perempuan diharapkan dapat menarik aspirasi dari masyarakat terutama perempuan dan memberikan masukan terkait dengan pembangunan desa yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya belum diperhatikan seperti kesehatan, pemberdayaan, dan pendidikan yang sering dikesampingkan dalam perencanaan pembangunan desa, dalam proses pengambilan keputusan tersebut, tentunya diperlukan komunikasi antar pengurus pemerintah desa, terutama komunikasi

antara laki-laki dan perempuan, dimana dalam budaya pedesaan yang masih didominasi oleh laki-laki dalam pengambilan keputusan, yang menjadikan laki-laki tentunya memiliki pengaruh terhadap perempuan dalam pengambilan keputusan dalam sudut pandang positif, seperti saran dan kerjasama, ataupun negative berupa intervensi dan dominasi, dengan aktifnya perempuan dalam pemerintah desa diharapkan mereka mampu menyampaikan pendapat dengan jujur dan bebas tanpa paksaan dan intervensi dari siapapun.

4.1 Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Desa

Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi fokus utama dalam upaya menciptakan sistem politik dan pemerintahan yang inklusif gender di tingkat desa. Partisipasi perempuan dapat berjalan dengan baik dalam pengambilan keputusan ketika mereka diakui dalam proses tersebut, baik secara formal maupun non-formal.

Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan pembangunan desa merupakan kunci untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi semua anggota masyarakat diakomodasi secara adil. Peran aktif perempuan dalam berbagai aspek kehidupan desa tidak hanya memperkaya proses pengambilan keputusan, tetapi juga membawa perubahan positif yang signifikan dalam lingkungan masyarakat desa. Oleh karena itu kemampuan perempuan dalam membangun gagasan dan menyampaikan pendapatnya dalam musyawarah dan rapat desa merupakan aspek penting dalam partisipasi politik pedesaan. Dimana dalam musyawarah dan rapat desa, perempuan memainkan peran penting dengan

membangun gagasan yang mampu mempengaruhi keputusan yang diambil dalam musyawarah maupun rapat desa.

4.1.1 Pengakuan terhadap partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan

Pengakuan perempuan dalam pengambilan keputusan didasarkan pada sebagian posisi Lembaga yang diisi oleh perempuan, seperti perangkat desa, BPD, PKK serta lembaga lainnya, salah satu pengakuan dalam partisipasi perempuan adalah terpilihnya perempuan menjadi Kepala Desa Pesagi dan Pagendisan, dimana dengan terpilihnya kepala desa perempuan mampu merubah stereotip bahwa hanya laki-laki yang menjadi pemimpin yang tentunya membuka sudut pandang pentingnya peran dan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Selain kepala desa perempuan, Desa Pesagi memiliki 3 perempuan dalam perangkat desa, serta 2 perempuan dalam BPD. Desa Pagendisan yang memiliki 4 perangkat desa perempuan dari 11 perangkat, dan 4 anggota BPD dari 7 anggota yang menjadikan masing-masing lembaga memiliki perwakilan, selain lembaga pemerintahan, juga terdapat PKK dimana di Desa Pagendisan dan pesagi merupakan desa yang dipimpin oleh kepala desa perempuan sama-sama berusaha meningkatkan keikutsertaan PKK dalam pembuatan keputusan karena PKK yang dianggap mampu merepresentasikan perempuan dalam pengambilan keputusan, dimana diharapkan mampu mengintegrasikan perspektif pembangunan desa, serta berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Di Desa Pesagi dan Pagendisan dalam proses Musrenbangdes selalu melibatkan perempuan, dimana mereka telah memberikan undangan formal terhadap perempuan dengan selalu melibatkan perempuan dalam rapat dan Musrenbangdes, dimana perempuan-perempuan yang masuk kedalam lembaga pemerintah desa selalu diberikan undangan rapat desa hal ini dapat dilihat dengan jumlah daftar hadir masing-masing desa dalam Musrenbangdes yang mana kehadiran perempuan di Desa Pesagi dihadiri 20 perempuan dari 49 peserta, dimana mereka terbagi dalam PKK, Bidan desa, BPD, Perangkat desa, serta fatayat NU yang juga merupakan anggota PKK, hal ini berbeda dari yang disampaikan oleh sekretaris Desa Pesagi dimana dalam Musrenbangdes beliau menyampaikan bahwa kehadiran perempuan tidak sampai 20%, tingginya kehadiran perempuan dalam Musrenbangdes Pesagi dikarenakan waktu yang dipilih untuk Musrenbangdes adalah pagi hari pada Hari Jumat, dimana pada Hari Jumat dimana pada waktu tersebut, perempuan yang memiliki anak dapat ikut hadir karena anak yang masih sekolah, serta waktu jumat dipilih karena rapat dipastikan selesai sebelum waktu sholat jumat yang menjadikan ibu-ibu dapat ikut hadir dan rapat tidak molor karena keterbatasan waktu yang ada.

Selain Musrenbangdes desa juga ada rapat yang dilakukan untuk membahas sedekah bumi, dimana dalam rapat tersebut tetap melibatkan PKK sebagai unsur perempuan, dengan kehadiran perempuan yang masih kurang, dalam rapat tersebut didominasi oleh kehadiran laki-laki dimana sebagian besar yang diundang adalah ketua RT, RW, dan tokoh masyarakat, rendahnya perempuan dalam rapat sedekah bumi dikarenakan dalam rapat sedekah bumi, perempuan masih dianggap tidak

terlalu penting, serta rapat yang dilakukan malam hari yang menjadikan sebagian anggota PKK tidak dapat hadir.

Tingginya kehadiran perempuan dalam Musrenbangdes dikarenakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk terus berupaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dengan meningkatkan kuota undangan perempuan, yang diharapkan dengan hadirnya perempuan dapat memberikan saran yang mampu merepresentasikan seluruh masyarakat desa.

Musrenbangdes pagendisan yang dihadiri oleh 13 perempuan dari 49 peserta yang hadir, yang terbagi dalam PKK, bidan desa, BPD, dan perangkat desa. Presentase kehadiran perempuan dari kedua desa tersebut adalah Desa Pesagi dengan 40% perempuan dan pagendisan dengan 26% perempuan yang hadir. Hal ini bertentangan dengan pernyataan sekretaris Desa Pagendisan dimana dalam Musrenbangdes perempuan selalu memenuhi kuota 30%, selain dalam Musrenbangdes kehadiran perempuan di Desa Pagendisan dalam rapat pembentukan panitia lelang dihadiri oleh 10 perempuan dari total 36 peserta dimana presentase tersebut adalah 27%, hal ini menunjukkan masih kurangnya kehadiran perempuan dalam rapat dan Musrenbangdes secara kuantitas di Desa Pagendisan, kurangnya keikutsertaan perempuan dalam Musrenbangdes juga dikarenakan faktor bahwa Musrenbangdes dilakukan pada malam hari, dimana dalam masyarakat desa ibu-ibu saat malam hari memiliki tanggung jawab untuk menemani anak mereka untuk belajar dan istirahat. selain itu faktor yang membuat masih sedikitnya perempuan Pagendisan yang mengikuti Musrenbangdes adalah karena dipagendisan memiliki system dimana dalam memberikan saran dapat

disampaikan kepada laki-laki, seperti yang terjadi di Dusun Ketanggi, dimana saran dari masyarakat akan di tampung oleh Kepala Dusun yang berikutnya disampaikan ketika Musrenbangdes, hal ini juga berlaku bagi PKK dimana mereka menyampaikan kepada ketua PKK untuk nanti disampaikan dalam Musrenbangdes, hal ini karena sebagian perempuan masih merasa malu untuk menyampaikan langsung dalam Musrenbangdes, serta jumlah undangan yang memang terbatas untuk perempuan.

Selain dalam rapat desa, juga diadakan Musyawarah Dusun (musdus) dimana dalam musdus tersebut hanya mengundang tokoh masyarakat di dusun, yang mana dalam musdus tidak ada perempuan yang ikut dalam musyawarah tersebut, sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Dusun ketanggi bapak Dwi Hartadi dimana keikutsertaan perempuan dalam musdus memang rendah karena sudah ada wadah lain yang menaungi seperti PKK dan Musrenbangdes.

4.1.2 Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan pembangunan desa

Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di Desa Pesagi dan Pagendisan dapat dilihat dalam Musrenbangdes, dimana dalam Musrenbangdes perempuan ikut hadir dan ikut dalam memberikan pendapat, perempuan Desa Pesagi dan Pagendisan terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan, yang mana dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan desa suara perempuan di Desa Pesagi dan Pagendisan memiliki hak dan suara yang sama yang mana mereka memiliki pengaruh yang setara dengan laki-laki dalam memberikan suaranya.

Pemerintah Pesagi dan Pagendisan telah berupaya dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembuatan keputusan dengan mengundang perempuan dalam Musrenbangdes serta memberikan kesetaraan dalam memberikan suara, namun meski begitu perempuan di Pesagi dan Pagendisan masih sedikit yang terlibat dalam pengambilan keputusan, terutama dalam menyampaikan pendapat, gagasan serta memberikan kritik.

Keterlibatan perempuan terlihat aktif dalam pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal domestik dan kemasyarakatan, dimana mereka memiliki wawasan yang mendalam tentang kebutuhan sehari-hari dan prioritas keluarga dalam masyarakat desa, seperti yang terjadi di Pesagi dimana perempuan berani menyampaikan gagasan berkaitan dengan air bersih yang tentunya dibutuhkan oleh setiap keluarga, yang mana saran seperti ini masih sedikit sadari oleh laki-laki, selain itu juga dengan menyediakan kebutuhan PMT balita dan lansia yang mana hal ini diperlukan untuk mengurangi jumlah anak stunting, dimana di Pesagi tingkat anak stunting menurun dari 9 anak menjadi 4 anak.

Dalam memberikan pendapatnya perempuan Pagendisan lebih fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan PKK dimana dalam Musrenbangdes mereka cenderung menjadi pengamat dan pendengar, dimana mereka memastikan bahwa program-program dan kebijakan yang diusulkan mempertimbangkan aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan, dan ekonomi rumah tangga. Perempuan Pagendisan lebih aktif berkegiatan dalam kegiatan PKK yang mana salah satu yang menjadi masukan PKK terhadap pemerintah Pagendisan adalah Penambahan

anggaran untuk kegiatan PKK, dimana hal ini disambut baik oleh pemerintah Pagendisan.

Aktifnya PKK Pesagi dan Pagendisan ini tidak terlepas dari peran kepala desa mereka dimana dengan kepala desa perempuan mereka lebih mudah untuk memberikan saran secara langsung, serta merasa memiliki pemahaman yang sama dalam melihat persoalan yang ada di desa, terutama dalam bidang kesehatan, lingkungan, dan pendidikan. Dengan adanya kepala desa perempuan mereka mampu memberikan inovasi dalam pembangunan desa, serta melihat peluang-peluang yang sebelumnya tidak dilihat oleh kepala desa sebelumnya, seperti di Pesagi dimana kepala desa memutuskan untuk memindahkan balai desa baru ke balai desa lama yang lebih strategis dimana hal ini ternyata meningkatkan pelayanan di Pesagi yang akhirnya masyarakat mulai banyak yang berdatangan untuk mengurus hal-hal di balai desa, dimana sebelumnya banyak masyarakat yang masih mengurus dokumen maupun surat di rumah perangkat masing-masing.

Sementara itu di Pagendisan salah satu kekurangan yang akhirnya dijadikan peluang oleh kepala desa adalah dengan memfokuskan perempuan dalam pelayanan desa, dimana dengan adanya perempuan dalam pelayanan di balai desa menjadikan pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Dimana mereka mampu berkomunikasi dengan baik serta menjelaskan kepada masyarakat dengan lebih jelas, selain itu dalam bidang pembangunan perempuan tidak diharuskan ikut dalam pengawasan langsung, dimana mereka hanya perlu melihat laporan yang dikirim oleh perangkat laki-laki melalui grup whatsapp, hal ini tentunya menjadi kerjasama yang saling menguntungkan dan efektif, dimana laki-laki yang lebih memahami pembangunan

ditugaskan dilapangan sementara perempuan yang mampu berkomunikasi dengan baik ditugaskan pada pelayanan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan (Kahsay et al., 2021) *“policies to increase women in formal leadership positions can contribute to sustainability and a more equitable distribution of benefits from extraction such as the benefits accruing to members other than just elites”*.

4.2 Kemampuan Perempuan dalam Membangun Gagasan dan Relasi

Gender di Desa Pesagi dan Pagendisan

Perempuan memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan, dimana dengan adanya pengaruh perempuan menjadikan keputusan dan kebijakan yang akan diambil sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat desa. Dengan banyaknya perempuan yang hadir dalam rapat dan Musrenbangdes, diharapkan perempuan mampu memberikan dampak signifikan dalam pembangunan desa. Namun, dalam pengambilan keputusan, seringkali perempuan memiliki banyak keterbatasan dalam menyampaikan pendapat dan membangun gagasan, dimana persoalan publik dan keputusan penting desa seringkali didominasi oleh laki-laki. Relasi gender seringkali menguntungkan laki-laki. Kondisi ini mendorong perlunya analisis mendalam tentang bagaimana perempuan bisa berkontribusi dalam membangun gagasan yang dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat. Oleh karena itu kemampuan perempuan dalam membangun gagasan serta relasi gender yang menyertaina di Desa Pesagi dan Pagendisan akan dijelaskan dengan teori dari Simone *“If woman discovers herself as the inessential and never turns into the essential, it is because she does not bring about this transformation herself”* (Beauvoir, 2010).

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, tantangan dalam memperkuat kemampuan perempuan dalam membangun gagasan dan meningkatkan partisipasi perempuan yang setara masih ada. Hal ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam bagaimana perempuan di Desa Pesagi dan Pagendisan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta relasi gender laki-laki terhadap perempuan dalam pengambilan keputusan.

4.2.1 Kemampuan perempuan dalam membangun gagasan, menyampaikan pendapat tentang isu dalam Musrenbangdes dan rapat desa

Dalam menyampaikan pendapat di Desa Pesagi, perempuan memberikan saran berdasarkan pengalaman dan kondisi kesehariannya, seperti Ibu Murtini yang memberikan saran tentang pengadaan air bersih ketika musim kemarau yang didasarkan pada pengalaman beliau saat kemarau kesulitan air bersih. Selain melalui Musrenbangdes, perempuan juga aktif menyampaikan pendapatnya dalam rapat desa, dimana hal ini disampaikan oleh PKK melalui perwakilannya yang mengusulkan untuk meningkatkan anggaran PKK serta menambah anggaran posyandu agar mendapatkan makanan yang baik untuk anak dan ibu, dimana hal ini berdampak pada kasus stunting di Desa Pesagi yang semula ada 9 anak stunting turun menjadi 4 anak, hal ini tentunya memberikan pengaruh positif dimana alasan dan saran yang diberikan berkaitan.

Seperti yang disampaikan oleh Rinawati dalam Jurnalnya “Pengaruh norma, tradisi, dan budaya dalam kehidupan masyarakat yang telah ada selama berabad-abad memberikan kesempatan lebih besar kepada laki-laki dibandingkan

perempuan.”. (Rinawati et al., 2004). Gagasan yang disampaikan oleh perempuan Pesagi didominasi oleh persoalan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat desa, seperti pendidikan, kesehatan, dan persoalan rumah tangga dimana pendapat mereka mampu memberikan solusi bagi Desa Pesagi dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam pembangunan desa yang berkaitan dengan pembangunan, perempuan Pesagi lebih menyerahkan hal itu kepada pihak laki-laki, dimana di Desa Pesagi perempuan menganggap laki-laki lebih memahami perencanaan pembangunan fisik seperti irigasi, jalan, rumah dan lain sebagainya yang mana dalam pembangunan tersebut perempuan lebih berperan dalam menyediakan konsumsi ketika pembangunan berlangsung maupun Musrenbangdes dan rapat pembangunan sedang dilakukan. Dalam menyampaikan gagasannya perempuan di Desa Pesagi masih kurang, hal ini terlihat dalam Musrenbangdes dimana masih sedikit perempuan yang menyampaikan pendapatnya, namun meskipun begitu dalam membangun gagasan mengenai alasan terkait usulannya, mereka mampu menjelaskan alasannya dengan baik dan jelas berkaitan persoalan yang mereka kuasai.

Dalam menyampaikan pendapat dan membangun gagasan di Desa Pagendisan, perempuan belum mampu menyampaikan gagasan dan pendapatnya dengan baik, hal ini terjadi dikarenakan dalam Musrenbangdes dan rapat, tingkat kehadiran perempuan masih minim, seperti yang terjadi dalam Musrenbangdes dimana perempuan tidak mampu memberikan saran dengan baik dikarenakan dalam beberapa lembaga saran akan disampaikan oleh ketua maupun perwakilannya yang notabennya adalah laki-laki, seperti yang terjadi pada KPMD

dan BPD Pagendisan dimana dalam memberikan sarannya mereka menyampaikan terlebih dahulu kepada ketua masing-masing yang mana akan disaring berdasarkan skala prioritasnya, selain itu dalam KPMD masih sedikit anggota perempuan yang ikut dalam Musrenbangdes maupun rapat desa sehingga menjadikan rendahnya keikutsertaan perempuan dalam memberikan gagasan dan pendapatnya, selain itu mereka menyerahkan perencanaan dan proses pembangunan desa kepada laki-laki yang lebih memahami persoalan. Kurangnya perempuan dalam memberikan saran dan gagasan di Desa Pagendisan dalam Musrenbangdes desa juga terjadi terhadap PKK dimana PKK lebih memfokuskan diri terhadap internalnya.

Dalam membangun gagasan dan menyampaikan pendapat tidak dapat lepas dari kepala desa perempuan, dimana Pesagi dan Pagendisan yang dipimpin oleh kepala desa perempuan diharapkan mampu menjadi *role model* terhadap perempuan lainnya dalam menyampaikan pendapat dan gagasannya. Dalam Musrenbangdes yang terjadi di Pesagi dan Pagendisan, kepala desa memiliki fungsi membuka dan menjelaskan tentang program RKPdes dan skala prioritas pembangunan desa, serta memberikan tanggapan tentang pendapat maupun masukan dari masyarakat didalam Musrenbangdes. Dalam menyampaikan pendapat dapat dilihat bahwa kepala Desa Pesagi dan Pagendisan mampu menjawab dan menanggapi masukan dan pertanyaan dari peserta dengan baik dimana, dalam beberapa saran yang belum masuk dalam prioritas rencana program tahun 2024 ini, akan coba di laksanakan menggunakan skema-skema yang ada, dan apabila sarannya tidak *urgent* akan dipertimbangkan untuk masuk dalam program tahun berikutnya. Selain dalam Musrenbangdes kepala Desa Pesagi dan Pagendisan

mampu memberikan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan desa, seperti yang terjadi di Pesagi dimana kepala desa saat ini memindahkan kantor desa dari gedung baru ke gedung lama, dimana hal ini dikarenakan gedung lama yang masih layak dan dapat dipugar, serta memiliki letak yang lebih strategis, hal ini ternyata memberikan dampak positif dimana balai desa menjadi ramai dan masyarakat dapat mengurus di balai desa lama. Hal lain dilakukan oleh kepala Desa Pagendisan dimana kepala desa membuat perdes larangan menanam rumput gajah di pinggir jalan dan bantaran sawah, dimana hal ini dilakukan untuk menghindari bahaya karena di beberapa titik tikungan jalan yang ditanami rumput gajah sering terjadi kecelakaan karena jalan depan yang tidak terlihat, selain itu untuk menghindari kecemburuan sosial dimana masyarakat yang memiliki lahan di pinggir jalan menanam rumput gajah sementara yang tidak memiliki lahan di pinggir jalan tidak bisa menanam rumput gajah, dampak dari kebijakan ini adalah jalanan yang lebih bersih dan jarak pandang pengendara di beberapa tikungan lebih baik karena tidak terhalang, serta tidak adanya kecemburuan sosial dimana jika ingin menanam rumput gajah tidak bisa lagi ditanam di pinggir jalan maupun bantaran sawah, dan harus menanam di lahan pribadi masing-masing, selain kebijakan ini juga ada kebijakan dimana balai desa menyediakan wifi gratis saat covid-19 berlangsung dimana keluarga yang tidak memiliki kuota dapat melakukan sekolah dan aktifitasnya di balai desa, yang menjadikan balai desa ramai dengan anak-anak yang harus mengerjakan tugas sekolah secara daring maupun sedang sekolah daring pada saat itu.

4.2.2 Relasi perempuan dan laki-laki dalam pembuatan keputusan di Desa Pesagi dan Desa Pagendisan.

Desa Pesagi dan Desa Pagendisan, yang dipimpin oleh kepala desa perempuan, menawarkan konteks unik untuk memahami dinamika perspektif politik gender dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan perempuan sebagai kepala desa di kedua desa ini merupakan kemajuan signifikan dalam kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan, terutama di lingkungan pedesaan di mana pemimpin sering kali diidentikkan dengan laki-laki. Menurut Soetjipto, tentang partisipasi perempuan dalam dekomrasi “Meskipun perempuan terlibat dalam transisi demokrasi, mereka belum sepenuhnya menikmati atau mentransformasikan partisipasi politik mereka untuk mendapatkan akses yang setara pada kekuasaan politik yang ada” (Ani W Soetjipto, 2013).

Meskipun kepala desa perempuan menunjukkan langkah positif, partisipasi perempuan dalam pembuatan kebijakan di Desa Pesagi dan Desa Pagendisan masih kurang maksimal. Banyak perempuan lebih fokus pada kegiatan PKK dan menyerahkan urusan pembangunan desa kepada laki-laki yang dianggap lebih memahami masalah tersebut.

Relasi gender dalam pembuatan keputusan di kedua desa mencerminkan ketidakseimbangan dalam partisipasi perempuan. Di Desa Pesagi, meskipun perempuan memiliki peran dalam Musrenbangdes dan rapat desa, mereka lebih cenderung aktif dalam isu-isu kesejahteraan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Namun, isu-isu terkait pembangunan desa yang lebih strategis, seperti perencanaan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya, masih dianggap sebagai

domain laki-laki. Stereotip bahwa laki-laki lebih kompeten dalam menangani masalah teknis dan strategis menghambat perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan yang lebih luas.

Di Desa Pesagi, dalam proses pengambilan keputusan, perempuan sering menyampaikan pendapat mereka melalui laki-laki, yang kemudian disampaikan dalam rapat desa. Hal ini juga terjadi di Desa Pagendisan, di mana perempuan lebih nyaman dan merasa aman menyampaikan pendapat mereka melalui laki-laki. Fenomena ini menunjukkan bahwa dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan masih sangat kuat, yang mengakibatkan keterlibatan perempuan menjadi terbatas hanya pada aspek-aspek tertentu. Selain itu, perempuan hanya menerima informasi tentang progres pembangunan tanpa partisipasi aktif dalam pengawasan dan pelaksanaan, yang menyebabkan kurangnya perspektif yang beragam dalam proses pembangunan desa.

Meskipun komunikasi dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan di Desa Pesagi dan Pagendisan menunjukkan adanya pengakuan terhadap pentingnya kolaborasi, wawancara dengan beberapa perempuan di desa mengungkapkan bahwa hambatan sosial dan budaya masih menghalangi partisipasi penuh mereka. Banyak perempuan masih merasa kurang percaya diri untuk berbicara di depan umum, dan norma gender yang menganggap laki-laki lebih dominan dalam peran publik masih kuat.

Di Desa Pesagi, perempuan yang memberikan pendapatnya melalui laki-laki dalam Musrenbangdes menunjukkan adanya pengakuan terhadap kontribusi

perempuan, meskipun peran laki-laki sebagai perantara ini juga mencerminkan bahwa laki-laki masih memiliki kontrol yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan. Di Desa Pagendisan, meskipun laki-laki mendukung partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait isu-isu sosial, kesehatan, dan pendidikan, praktik di lapangan menunjukkan bahwa perempuan sering kali enggan menyampaikan pendapat mereka secara langsung dan lebih memilih menitipkannya kepada laki-laki. Hambatan sosial ini perlu diatasi untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih substansial dalam pengambilan keputusan di kedua desa.

Dengan demikian, meskipun ada langkah-langkah positif menuju kesetaraan gender di Desa Pesagi dan Pagendisan, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi hambatan sosial dan budaya yang menghalangi partisipasi penuh perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini penting agar pembangunan desa dapat lebih inklusif dan mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat, tanpa memandang jenis kelamin.

4.2.3 Pengaruh laki-laki terhadap perempuan dalam pengambilan keputusan

Dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perempuan dalam Musrenbangdes dan rapat desa tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, lingkungan, pendidikan, pengetahuan, ekonomi, serta pengaruh dari laki-laki. Pengaruh laki-laki terhadap perempuan dalam pengambilan keputusan dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial dan budaya setempat, dimana beberapa laki-laki mungkin mengambil peran sebagai pendukung dan pendorong partisipasi

perempuan, dan dilain sisi tantangan lainnya mungkin termasuk resistensi terhadap perubahan status yang menguntungkan laki-laki secara tradisional. Pengaruh yang diberikan laki-laki terhadap perempuan di Desa Pesagi dan Pagendisan ini akan dijelaskan dengan teori dari Flax dimana “Relasi gender, merupakan hubungan gender yang telah didefinisikan dan secara tidak sempurna dikontrol oleh salah satu aspek-aspeknya yang saling terkait yaitu laki-laki” (Flax, 1987).

Di Desa Pesagi pengaruh laki-laki dapat dilihat dalam Musrenbangdes dan rapat desa laki-laki memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pengambilan keputusan. Seperti yang disampaikan oleh Ketua PKK Pesagi, saran dan pendapat perempuan seringkali terfokus pada bidang-bidang tertentu yang dianggap "domestik" seperti kesehatan dan kesejahteraan sosial. Dimana dalam pengambilan keputusan terkait dengan pembangunan, perempuan masih pasif dalam memberikan pendapatnya dimana dalam pengambilan keputusan didominasi oleh laki-laki sehingga dalam pengambilan keputusan lebih dipengaruhi oleh laki-laki. Sebagai contoh, Ketua BPD Pesagi menyatakan bahwa dalam bidang pembangunan, laki-laki lebih dominan sedangkan perempuan lebih aktif di bidang PKK dan kesehatan. Hal ini tentunya memberikan gambaran tentang nilai-nilai gender tradisional dimana perempuan dikonstruksikan memahami persoalan domestik rumah tangga, dan pemberdayaan masyarakat melalui bidang kesehatan dan rumah tangga, sementara laki-laki dipandang mengetahui pembangunan desa, yang menjadikan dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan desa dan keputusan strategis lainnya, laki-laki memiliki pengaruh yang dominan. Pengaruh laki-laki terhadap perempuan dalam pengambilan keputusan di Desa Pesagi

umumnya bersifat positif dimana laki-laki menghargai saran dari perempuan meskipun bidang pengaruh mereka berbeda. Seperti yang disampaikan ketua BPD Pesagi dan beberapa tokoh masyarakat menyatakan bahwa saran dari perempuan dipertimbangkan dalam Musrenbangdes, meskipun lebih banyak berkaitan dengan bidang sosial dan kesehatan.

Meskipun dalam beberapa hal laki-laki memberikan pengaruh positif dengan mendukung serta menerima pendapat perempuan dalam pengambilan keputusan, dalam proses pengambilan keputusan, perempuan jarang memimpin rapat kecuali dalam kegiatan PKK. Dimana dalam Musrenbangdes atau rapat desa perempuan tidak pernah bertindak sebagai pemimpin, perempuan menjadi pimpinan rapat hanya ketika rapat PKK saja yang mana seluruh pesertanya adalah perempuan. Selain itu meskipun suara perempuan didengar, keputusan akhir sering kali lebih dipengaruhi oleh suara laki-laki. Dimana perempuan dianggap kurang aktif dalam bidang pembangunan dan program pemerintah lainnya. Ini menunjukkan bahwa dominasi laki-laki masih cukup kuat dalam proses pengambilan keputusan di luar bidang PKK dan kesehatan. Dominasi laki-laki dalam keputusan terkait pembangunan dapat mengakibatkan kurangnya perspektif perempuan dalam merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan yang mungkin lebih inklusif dan memperhatikan kebutuhan seluruh masyarakat.

Dalam Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala Desa Pesagi tentunya juga dipengaruhi oleh laki-laki, seperti pengaruh suaminya, dimana suami kepala Desa Pesagi memiliki peran aktif dalam memberikan masukan yang bermanfaat bagi kepala Desa Pesagi. Hal ini menunjukkan dukungan positif dan

membangun dari suami terhadap kepemimpinan dan tanggung jawab publik istrinya. Dimana dukungan besar dari suami ini, sangat mempengaruhi keberhasilannya dalam perubahan peran, yang sebelumnya hanya memiliki peran domestik tradisional sebagai ibu rumah tangga, menjadi pemimpin masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengaruh peran gender tradisional dimana beliau sebelumnya hanya sebagai ibu rumah tangga dan saat ini menjadi kepala desa yang merubah kehidupannya secara signifikan, berkat dukungan dari suami dan keluarga dapat berperan penting dalam memberikan dukungan moral dan praktis bagi kepala Desa Pesagi dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dukungan yang diberikan oleh suami Ibu Sri Handayani selaku kepala desa tidak hanya dukungan moral semata namun juga menyangkut dukungan ekonomi dimana suaminya yang berkerja sebagai kontraktor yang kaya dan sukses di desa, memiliki pengaruh sosial dan ekonomi yang signifikan, dimana hal ini mampu mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap istri yang menjadi kepala desa. Dukungan ekonomi tersebut dapat memberikan dukungan finansial dan sumber daya yang penting bagi istri yang menjadi kepala desa.

Selain pengaruh dari suami, Ibu Sri Handayani selaku kepala Desa Pesagi juga mendapatkan pengaruh dari laki-laki dimana dalam pengambilan keputusannya terdapat dukungan yang dilakukan oleh sekretaris desa dimana secara pendidikan sekretaris desa memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, yang menjadikan dalam hal-hal administratif dan kegiatan formal, banyak diwakili oleh sekretaris desa sebagai tangan kanan kepala desa, dimana mereka bekerjasama untuk saling mendukung dan menutupi kekurangan masing-masing. Dalam

kepemimpinannya kepala Desa Pesagi mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari masyarakat desa, yang mana terdapat perubahan signifikan yang membawa dampak positif dalam pembangunan desa di bawah kepemimpinannya, terutama dalam bidang PKK dan kesehatan.

Sementara itu di Desa Pagendisan, pengaruh laki-laki dalam pengambilan keputusan, terdapat kecenderungan bahwa perempuan dipengaruhi oleh laki-laki, terutama dalam hal-hal yang memerlukan keputusan strategis atau lapangan. Laki-laki sering kali memberikan masukan atau pengaruh positif untuk memastikan usulan yang diajukan perempuan yang dianggap relevan dan bermanfaat bagi kepentingan umum. Sebagai contoh, dalam usulan PMT dan senam lansia, dimana laki-laki bertanya mengenai manfaat dan kebutuhan sebelum keputusan diambil, hal ini menunjukkan bahwa laki-laki aktif dalam proses pengambilan keputusan dengan memastikan bahwa usulan yang diberikan oleh perempuan memang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

pengaruh laki-laki juga dirasakan kepala Desa Pagendisan, dimana dalam kepemimpinannya mendapat dukungan penuh dari suaminya yang juga menjabat sebagai Sekretaris Desa. Dimana mereka sering berdiskusi mengenai pekerjaan baik di rumah maupun di kantor. Suami kepala desa memberikan masukan yang signifikan karena lebih berpengalaman dalam hal lapangan, karena sebelumnya menjabat sebagai kepala desa selama dua periode yang saat ini dilanjutkan oleh Ibu Wiwin Herniti selaku istrinya yang membuat komunikasi lebih lancar dan efektif. Selain suaminya, kepala Desa Pagendisan juga berkonsultasi dengan perangkat desa laki-laki lainnya sebelum membuat keputusan penting. Hal ini mencerminkan

adanya pengaruh laki-laki dalam proses pengambilan keputusan, dimana kepala Desa Pagendisan harus memastikan program dan keputusannya ini didukung oleh anggota laki-laki dalam rapat dan Musrenbangdes .

Meskipun ada upaya untuk mencapai kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan di Desa Pagendisan dengan pengaruh dan dukungan dari laki-laki yang bersifat positif dan membangun, masih terdapat dominasi laki-laki dan batasan dalam kewenangan perempuan. Perempuan dianggap memiliki peran signifikan, tetapi hanya dalam konteks yang dipengaruhi oleh laki-laki atau dalam lingkup yang lebih terbatas. Dimana meskipun perempuan aktif berpartisipasi dalam rapat dan menyampaikan pendapat, sering kali keputusan akhir masih sangat dipengaruhi oleh laki-laki. Laki-laki cenderung mendominasi dalam pengambilan keputusan terutama dalam aspek fisik dan lapangan, sementara perempuan lebih fokus pada bidang-bidang yang terkait dengan peran tradisional mereka seperti kesehatan dan kesejahteraan. Yang menjadikan perempuan tidak memiliki kewenangan penuh dalam seluruh aspek pengambilan keputusan.

Meskipun komunikasi antara laki-laki dan perempuan terjalin dengan baik dan tanpa adanya kesenjangan yang signifikan dalam forum Musrenbangdes, perempuan sering kali menyampaikan pendapat mereka melalui laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal ada kesetaraan, dalam praktiknya masih ada ketergantungan perempuan terhadap laki-laki dalam menyampaikan aspirasi mereka. Walaupun laki-laki memberikan pengaruh positif dan dukungan dalam pengambilan keputusan, hal ini tetap menunjukkan bahwa perempuan membutuhkan persetujuan atau pengaruh dari laki-laki untuk melanjutkan ide-ide

mereka, ini menunjukkan adanya dominasi laki-laki yang meskipun positif, tetap membatasi otonomi perempuan.

Sementara itu, pengaruh dari suami kepala Desa Pagendisan yang juga merupakan seorang kades dan mantan kepala desa sebelumnya menjadikan pengalaman suami sebagai sekdes yang lebih diutamakan dalam pengambilan keputusan, yang mana dapat menghambat pengembangan dan pemberdayaan perempuan dalam konteks pengambilan keputusan, karena mereka mungkin merasa kurang berpengalaman atau tidak cukup kompeten.

Diskusi intensif tentang pekerjaan di rumah bisa mengaburkan batas antara kehidupan pribadi dan profesional. Hal ini bisa mengakibatkan keputusan yang seharusnya dibahas secara profesional di lingkungan kantor menjadi dipengaruhi oleh dinamika pribadi, yang bisa mengurangi objektivitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu dukungan yang diterima kepala Desa Pagendisan oleh suaminya mungkin tidak berlaku bagi perempuan lain yang tidak memiliki dukungan serupa. Seperti yang disampaikan oleh Indrawati “Hanya tokoh-tokoh perempuan tertentu yang terlibat dalam pengambilan keputusan yang mana tokoh tersebut juga sekaligus adalah istri dari tokoh laki-laki” (Indrawati, 2003). Ini bisa menciptakan kesenjangan di mana hanya perempuan dengan dukungan laki-laki yang kuat dapat berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam pengambilan keputusan. Perempuan lain yang tidak memiliki pasangan dengan posisi yang kuat mungkin merasa terpinggirkan atau kurang diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu Sekdes yang juga merupakan suami kepala Desa Pagendisan lebih sering mengambil peran utama dalam rapat dan Musrenbangdes serta ketika menemui tamu-tamu dinas, seringkali sekdes lah yang menanggapi dan menemui dinas-dinas terkait, sementara kepala Desa Pagendisan menyimak dan cukup memberikan persetujuan terkait apa yang dilakukan sekdes yang sekaligus suaminya. Hal ini tentu akan menciptakan persepsi bahwa kepemimpinan desa sebenarnya berada di tangan suaminya, meskipun secara formal kepala desa adalah istrinya, hal ini dapat menghambat pengakuan dan penghargaan terhadap kepemimpinan kepala Desa Pagendisan. Ini bisa berdampak negatif pada persepsi masyarakat terhadap kemampuan kepala desa dalam memimpin. Kepala desa yang lebih banyak menyimak dan hanya memberikan persetujuan bisa dilihat sebagai pembatasan peran perempuan dalam kepemimpinan. Ini dapat memperkuat stereotip gender di mana laki-laki dianggap lebih kompeten dalam urusan administrasi dan keputusan strategis. Hal ini tentunya dapat menciptakan hambatan bagi perempuan lain yang ingin mengambil peran kepemimpinan di Desa Pagendisan, karena mereka mungkin melihat contoh ini sebagai bukti bahwa mereka perlu bergantung pada dukungan laki-laki untuk berhasil.

Selain itu, fakta bahwa sekdes pagendisan adalah suaminya sekaligus mantan kepala desa dapat menunjukkan adanya politik dinasti di pagendisan, yang mana ini dapat memperkuat kontrol kekuasaan dalam satu keluarga, yang bisa menghambat partisipasi dan keterlibatan masyarakat yang lebih luas dalam pemerintahan desa. Pengaruh Besar dalam Keputusan sekdes yang sering menanggapi dan menemui dinas-dinas terkait menunjukkan bahwa meskipun

jabatan resmi kepala desa berada pada istrinya, pengaruh dan kontrol substantif tetap berada pada mantan kepala desa (suaminya). Ini bisa mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Hal ini tentunya berdampak pada semakin berkurangnya kesempatan bagi individu lain untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan lokal, yang dapat merusak prinsip demokrasi dan meritokrasi. Kepemimpinan yang terpusat pada satu keluarga dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan, dimana keputusan yang diambil dikhawatirkan didasarkan pada kepentingan keluarga daripada kepentingan masyarakat luas.

4.3 Peluang dan Hambatan bagi Perempuan dalam Pengambilan

Keputusan Desa di Desa Pesagi dan Pagendisan

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan pemerintahan dengan memberikan alokasi kuota minimal bagi perempuan di berbagai lembaga pemerintahan, menjadikan peluang perempuan dalam proses pengambilan keputusan semakin meningkat, dimana melalui kebijakan yang mendukung, perempuan dapat memanfaatkan peluang ini untuk berkontribusi secara signifikan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan desa.

Namun, meski peluang perempuan dalam pengambilan semakin meningkat, norma sosial dan budaya yang patriarki masih kuat di banyak desa, termasuk di Desa Pesagi dan Desa Pagendisan. Tradisi dan kepercayaan yang menempatkan perempuan pada peran domestik dan laki-laki pada peran publik membuat perempuan sulit untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan.

4.3.1 Peluang perempuan dalam proses pengambilan keputusan

Pesagi dan Pagendisan telah melakukan pendampingan partisipatif dalam meningkatkan peluang perempuan dalam pengambilan keputusan, kedua desa tersebut selalu melibatkan perempuan secara aktif dalam Musrenbangdes dan rapat desa, dimana dalam setiap Musrenbangdes selalu mengundang perempuan untuk berpartisipasi dalam Musrenbangdes yang mana Pesagi dan Pagendisan memberikan kuota minimum 30% undangan yang diberikan kepada masyarakat yang mana dalam keberjalanannya dalam beberapa rapat desa tingkat kehadiran perempuan mencapai 30% tersebut, seperti dalam penetapan penerima BLT DD Pesagi yang diikuti oleh 18 peserta terdapat 4 diantaranya adalah perempuan, dan Pagendisan dihadiri oleh 25 peserta dengan 8 diantaranya perempuan, dalam rapat BLT DD ini tingkat kehadiran perempuan tidak sampai setengah dari laki-laki, namun di Pagendisan tingkat kehadiran sudah memenuhi kuota minimal 30% sementara Pesagi masih dibawah 30% kuota minimal, hal ini berbanding terbalik dimana dalam Musrenbangdes tingkat kehadiran perempuan di Pesagi telah memenuhi alokasi kuota minimal dan Pagendisan masih kurang dari alokasi kuota minimal, tingkat kehadiran ini berkaitan dengan waktu dan hari yang dipilih dalam rapat, serta siapa saja yang diundang karena pemilihan, seperti dalam Musrenbangdes Pagendisan yang dilaksanakan pada malam hari yang menjadikan perempuan memilih izin karena waktu yang terlalu malam, ataupun menemani anaknya untuk belajar dan istirahat.

Peluang perempuan dalam proses pengambilan keputusan di Desa Pesagi dan Pagendisan tidak hanya sebatas keterwakilan semata, namun peluang tersebut makin terbuka dan nyata dalam pengambilan keputusan dimana kedua desa tersebut memiliki kepala desa perempuan. Kehadiran kepala desa perempuan di kedua desa tersebut telah membuka peluang yang lebih luas dan nyata bagi perempuan untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Peluang perempuan dalam proses pengambilan keputusan di Desa Pesagi dan Desa Pagendisan tidak hanya terbatas pada keterwakilan semata, tetapi juga mencerminkan partisipasi yang lebih substansial dan nyata. Kehadiran kepala desa perempuan di kedua desa tersebut telah membuka peluang yang lebih luas dan konkret bagi perempuan untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Berikut ini adalah rincian bagaimana peluang-peluang tersebut terwujud dan didukung dalam kedua desa tersebut.

Di Desa Pesagi dan Desa Pagendisan, kepala desa perempuan telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan bahwa perempuan memiliki tempat yang penting dan setara dalam pengambilan keputusan desa. Termasuk menetapkan kuota minimum untuk partisipasi perempuan dalam setiap rapat desa melalui undangan-undangan yang diberikan harus minimal mengalokasikan 30% perempuan untuk memastikan terjaminnya suara dan aspirasi perempuan. Kepemimpinan kepala desa perempuan di Pesagi dan Pagendisan juga mendorong berbagai inisiatif pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di Desa Pesagi, dengan revitalisasi bahu jalan yang sebelumnya semak belukar menjadi lebih bersih mnejadikan banyak masyarakat yang mulai membuka usaha di halaman rumah karena saat ini lebih mudah dilihat, serta bahu jalan depan masjid yang masih luas

menjadi tempat masyarakat untuk berjualan yang menjadikan perputaran ekonomi Pesagi mampu berputar dengan baik serta meningkatkan daya beli masyarakat, selain itu kepala Desa Pesagi menjadikan halaman depan gedung baru Desa Pesagi yang tidak terpakai untuk menjadi angkringan yang mana setiap malam tempat tersebut menjadi ramai, program terbaru yang akan dilakukan oleh kepala Desa Pesagi adalah dengan merubah gedung baru pemerintah yang tidak terpakai untuk menjadi tempat UMKM masyarakat setempat untuk membuka usaha dimana nantinya tempat tersebut akan menjadi semacam *puja sera*, serta menjadi salah satu pemasukan desa melalui BUMDes. Kepala Desa Pagendisan memiliki program BUMDes simpan pinjam bagi masyarakat yang memberikan pelatihan kewirausahaan dan akses ke modal usaha, sehingga perempuan dapat berkontribusi lebih besar dalam ekonomi desa. Dimana dalam waktu dekat kepala Desa Pagendisan akan menghidupkan kembali proyek-proyek pengembangan ekonomi, seperti kerajinan tangan dan pertanian, dimana program ini dimulai dari mengajak masyarakat untuk menanam pohon berbuah di halaman rumah, yang dimaksudkan selain menjadi peneduh lingkungan rumah juga menjadi salah satu pendapatan sampingan yang dapat dimanfaatkan ketika musim buah tiba.

Untuk mendukung partisipasi perempuan, kepala desa perempuan di kedua desa ini juga bekerja sama dengan tokoh agama dan adat untuk mengkampanyekan pentingnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan sebagai bagian dari nilai-nilai lokal yang dihormati. Di mana kedua desa tersebut memiliki Fatayat NU yang diisi oleh perempuan yang mana mereka selalu melakukan kegiatan setiap hari jumat sehabis shalat jum'at, yang mana kegiatan tersebut berisi kegiatan

mengaji dan sholat serta menjadi salah satu wadah untuk menyebarkan informasi terkini tentang kebijakan desa melalui kegiatan tersebut.

4.3.2 Faktor yang menghambat keikutsertaan Perempuan dalam pengambilan keputusan.

Berbagai perbedaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, baik secara langsung melalui perlakuan dan sikap, maupun tidak langsung melalui dampak dari aturan dan kebijakan, dapat menimbulkan ketidakadilan dalam berbagai struktur masyarakat. Bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan akibat diskriminasi gender meliputi, marginalisasi, sub ordinasi, stereotipe, kekerasan, serta beban kerja (Budiman, 1985).

Terpilihnya perempuan sebagai kepala desa, serta alokasi kuota minimal 30% yang ditetapkan oleh pemerintah desa tentunya memberikan angin segar dalam dinamika politik gender. Namun, berbagai faktor yang menghambat keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan di desa masih tetap ada dan memerlukan perhatian.

Di Desa Pesagi, meskipun dalam Musrenbangdes dan rapat desa mampu memenuhi kuota 30% untuk perempuan, dalam proses berjalannya masih sedikit perempuan yang berpartisipasi aktif dalam rapat desa. Ini disebabkan oleh pandangan bahwa perempuan tidak terlalu memahami pembangunan desa, yang mana urusan desa adalah tanggung jawab laki-laki. Dan perempuan telah memiliki wadah sendiri melalui PKK yang mana fokus pembahasannya adalah mengenai kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, serta hal-hal yang masuk dalam kerja PKK

seperti posyandu, posbindu, stunting. Dalam hal ini perempuan dianggap lebih cocok atau lebih sering terlibat dalam bidang PKK. Hal ini menandakan peran tradisional perempuan yang sering dikaitkan dengan pengasuhan, kesejahteraan keluarga, dan kesehatan, yang dilihat sebagai perpanjangan dari peran domestik mereka. Sementara laki-laki lebih sering terlibat dalam bidang pembangunan, yang mungkin mencakup aspek-aspek seperti infrastruktur, ekonomi, dan pengambilan keputusan strategis.

Hal ini menunjukkan peran laki-laki yang diasosiasikan dengan dominasi, otoritas, dan tanggung jawab publik yang lebih besar. Hal ini dapat menghambat perkembangan dan partisipasi aktif perempuan dalam bidang yang secara umum didominasi oleh laki-laki, seperti pembangunan. Dimana ketika hadir dalam rapat desa, perempuan sering kali merasa tidak berani mengemukakan pendapat karena takut, dan tidak memahami pembangunan desa yang dianggap urusan laki-laki.

Hal yang sama terjadi di Pagendisan dimana laki-laki lah yang dianggap lebih mengerti tentang pembangunan desa, dimana perempuan telah diberikan ruang melalui PKK yang menjadikan dalam pelaksanaannya perempuan masih minim dalam menyampaikan pendapat terkait pembangunan desa melalui Musrenbangdes yang menjadikan perspektif dan kebutuhan perempuan tidak terwakili dengan baik. Ini bisa menghasilkan kebijakan yang tidak sepenuhnya inklusif. Rendahnya tingkat SDM perempuan Desa Pesagi dan Pagendisan dalam pengambilan keputusan juga menjadi penghambat signifikan. Perempuan yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai sering kali merasa tidak percaya diri untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan,

“Biasanya aktif hadir, tapi dalam menyampaikan pendapat itu masih minim. Ada beberapa saja yang menyampaikan pendapat. SDM disini memang masih kurang tapi sudah kita ajak rembukan musyawarah biar ada kesetaraan gender”. (Wawancara Sekdes Pesagi pada 16 Oktober 2023).

“Untuk perempuan tingkat kehadirannya kurang, karena perempuan kan punya wadah sendiri, biasanya kalau musdus kurang tapi kalau musren lumayan banyak”. (Wawancara Tokoh Pagendisan pada 8 November 2023).

Pendidikan menjadi salah satu faktor yang mejadikan rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, terutama ketika mereka berpendapat. Bahkan hal ini dirasakan sendiri oleh kepala Desa Pesagi Ibu Sri Handayani yang mana beliau yang tidak memiliki pendidikan sarjana terkadang merasa minder dengan masyarakat, yang menjadikan pada awal-awal masa kepemimpinan beliau merasa kurang percaya diri dalam menyampaikan program kerja dan memberikan sambutan yang pada akhirnya beliau memilih untuk merekrut asisten sebagai konsultan pribadinya dalam public speaking, agar yang disampaikan tepat dan tidak keliru. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai kepala desa perempuan menghadapi lebih banyak tekanan sosial ketika berbicara di depan umum dibandingkan dengan laki-laki. anggapan laki-laki lebih dominan dalam komunikasi publik menyebabkan perempuan merasa kurang percaya diri serta menghadapi kesulitan saat harus berbicara di depan umum.

Perempuan sering kali memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya seperti informasi, dan pandangan sosial yang penting untuk partisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketidaksetaraan ini membuat perempuan berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki. Seperti yang terjadi di Pagendisan tentang musdus yang mempunyai lingkup lebih kecil dari desa. Keseluruhan peserta dalam musdus tersebut adalah laki-laki, hal ini didasarkan

pada keberpihakan kepada laki-laki karena laki-laki yang dianggap tau kondisi lapangan lokasi tersebut. *“Kalau di musdus memang keberpihakannya memang paling besar ya bapak-bapak, dan mereka yang tau kondisi lapangan juga”* hal inilah yang menjadi informasi terkait hasil rapat desa/Dusun sering kali tidak sampai kepada perempuan. banyak perempuan yang tidak mengetahui atau terlambat mendapatkan informasi tentang kesempatan untuk berpartisipasi. Hal ini tidak hanya berlaku dalam pengambilan keputusan namun dalam pengawasan pembangunan.

“Kalau pengawasan fisik biasanya laki-laki, kalau kita (perempuan) pengawasan tidak sepenuhnya, kalau kita kan cukup tahu saja anggaran sekian untuk pembangunan di daerah mana, sekedar itu saja, tapi kalau untuk keseluruhan di lapangan biasanya bapak-bapak”. (Wawancara Kepala Desa Pagendisan pada 2 November 2023).

Ini menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas berdasarkan gender dalam konteks pengawasan proyek pembangunan di desa. Tugas pengawasan fisik proyek, seperti memantau kemajuan pembangunan di lapangan, umumnya dipercayakan kepada laki-laki. Hal ini mencerminkan stereotip gender tradisional yang menempatkan laki-laki pada peran yang lebih fisik dan aktif di lapangan, sementara perempuan lebih banyak terlibat dalam aspek administratif, seperti mengetahui alokasi anggaran dan lokasi pembangunan, tanpa terlibat langsung dalam pengawasan di lapangan. Keterbatasan partisipasi perempuan dalam aspek-aspek yang lebih mendetail dan penting dari proyek pembangunan, menunjukkan bahwa meskipun perempuan memiliki akses terhadap informasi penting, mereka tidak sepenuhnya dilibatkan dalam implementasi dan pengawasan di lapangan. Perbedaan pembagian tugas dalam pengawasan ini disebabkan oleh persepsi bahwa

laki-laki lebih kompeten dalam menangani pekerjaan fisik atau teknis, atau karena tradisi yang mengarahkan laki-laki untuk mengambil peran tersebut.

Pembagian peran yang tidak seimbang ini dapat menciptakan ketidaksetaraan peluang bagi perempuan untuk mengembangkan keterampilan pengawasan, dengan keterlibatan yang terbatas, perempuan tidak memiliki informasi atau pengalaman yang diperlukan untuk berkontribusi secara penuh, dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengawasan pembangunan yang mengakibatkan kurangnya perspektif yang beragam dalam menangani masalah di lapangan, yang bisa mempengaruhi efektivitas pengawasan secara keseluruhan.

**Perbandingan Hasil Analisis Keterlibatan Perempuan dalam Pembuatan
Keputusan di Ranah Pemerintahan Desa dalam Perspektif Politik Gender**

Aspek/Indikator	Desa Pesagi	Desa Pagendisan
Peran Perempuan di Pemerintahan Desa	• Perempuan aktif dalam Musrenbangdes. • Gagasan perempuan lebih banyak terkait isu-isu domestik (pendidikan, kesehatan, rumah tangga). • Kepemimpinan perempuan sebagai kepala desa memberikan contoh positif meski partisipasi belum maksimal.	• Peran perempuan dalam Musrenbangdes lebih terbatas. • Kehadiran perempuan dalam rapat desa masih minim. • Gagasan sering kali disaring dan disampaikan oleh laki-laki.
Gagasan Perempuan dalam Isu yang Dibahas	• Perempuan di Desa Pesagi sering memberikan saran berdasarkan pengalaman keseharian. • Gagasan yang disampaikan biasanya didominasi oleh isu kesejahteraan sosial.	• Perempuan kesulitan menyampaikan gagasan dengan baik. • Tingkat partisipasi rendah dan sering diserahkan kepada laki-laki.
Faktor Penghambat Partisipasi Perempuan	• Dominasi laki-laki dalam keputusan besar sering kali menghambat gagasan perempuan. • Perempuan cenderung menghindari isu-isu pembangunan fisik.	• Rendahnya kehadiran perempuan dalam Musrenbangdes. • Perempuan sering menyerahkan pengambilan keputusan kepada laki-laki.
Relasi antara Laki-laki dan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	• Relasi gender cukup terbuka, meskipun laki-laki masih memegang peran sentral dalam keputusan strategis. • Ada upaya dari pihak desa untuk lebih melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan.	• Relasi gender lebih konservatif, dengan peran perempuan dalam pengambilan keputusan yang sangat terbatas. • Kebijakan dan keputusan strategis masih didominasi oleh laki-laki, dengan sedikit ruang bagi perempuan untuk berperan aktif.